

**PENGARUH PENEGAKAN PERATURAN, SISTEM KOMPENSASI,  
KETAATAN ATURAN AKUNTANSI DAN MORALITAS APARAT  
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI  
DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING SERTA PENGARUHNYA TERHADAP  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
(Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru)

Oleh :  
**Tiffany Pratiwi**  
Pembimbing : **Emrinaldi Nur DP dan Rofika**

*Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia*  
e-mail : [tiffanypratiwi22@gmail.com](mailto:tiffanypratiwi22@gmail.com)

*The Influence of Rule Enforcement, Compensation System, Compliance of  
Accounting Rules and Morality of Apparatus to the Tendency of  
Accounting Fraud with Unethical Behavior as Intervening  
Variable and its Influence on the Performance of  
Government Agencies*  
(Study On SKPD In Pekanbaru)

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the direct effect of rule enforcement, compensation system, compliance of accounting rules and morality of apparatus toward tendency of accounting fraud and the direct effect of rule enforcement, compensation system, compliance of accounting rules and morality of apparatus toward unethical behavior and indirect effect of rule enforcement, compensation system, compliance of accounting rules and morality of apparatus toward tendency of accounting fraud which is mediated by unethical behavior and the direct effect of tendency of accounting fraud toward performance of government agencies. This study was conducted at 27 departments in Pekanbaru with 75 respondents. The data were analyzed by using PLS (Partial Least Square) analysis technique, while the method of determining the sample is by using purposive sampling method. The result shows that rule enforcement and morality of apparatus have direct influence toward tendency of accounting fraud. Nonetheless, compensation system and compliance of accounting rules variable do not have influence toward tendency of accounting fraud. The influence of compensation system, compliance of accounting rules and morality of apparatus was significantly affecting the unethical behavior, but rule enforcement variable does not have influence toward unethical behavior. The influence of compensation system, compliance of accounting rules and morality of apparatus was significantly affecting the tendency of accounting fraud through unethical behavior. But, rule enforcement does not have significantly affecting to tendency of accounting fraud through unethical behavior.*

*Keywords: tendency of accounting fraud, unethical behavior and PLS (Partial Least Square)*

## PENDAHULUAN

Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Kecurangan akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu negara. Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada semester I tahun 2014 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi yang mencapai 308 kasus. Kasus korupsi banyak terjadi di daerah dan total kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp3,7 triliun.

Pada tahun 2013, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi yang tinggi di dunia, yaitu peringkat 114 dari 177 negara terkorup dengan indeks korupsi 32. Skor CPI ini diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia (*Transparancy Internasional*, 2013). Data mengenai kecurangan akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sudah demikian mengkhawatirkan karena telah merugikan negara dalam jumlah besar.

Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Puspasari (2012), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu pernyataan palsu, penyalahgunaan aset dan korupsi. Kecurangan akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu negara.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah penegakan peraturan, sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas aparat dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah. Variabel tersebut dipilih dan dikembangkan karena peneliti ingin

mengetahui sejauh mana variabel tersebut mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah penegakan peraturan. Peraturan merupakan ikatan, aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota organisasi selama proses operasional sehingga proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengendalikan perilaku anggota organisasi agar proses operasional organisasi berjalan secara efektif dan efisien, dibuatlah peraturan organisasi.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan, adanya ketidaksesuaian sistem kompensasi dapat menimbulkan tekanan bagi seseorang. Adanya tekanan yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian sistem kompensasi dapat memicu terjadinya kecurangan akuntansi.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan terhadap standar akuntansi yang ada dalam membuat laporan keuangan merupakan suatu keharusan sehingga menjamin bahwa tujuan dari pembuatan laporan keuangan dapat terwujud. IAI (2002), menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, untuk mendapatkan kredibilitas informasi tersebut manajemen harus melaksanakan aturan akuntansi yang berlaku umum.

Variabel keempat adalah moralitas aparat. Moralitas berasal dari kata sifat lain "moralis" mempunyai arti yang pada dasarnya

sama dengan moral. Moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku seorang individu. Dalam teori perkembangan moral Kohlberg menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pra konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca konvensional.

Penelitian ini menggunakan variabel intervening, dimana variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel intervening yang digunakan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan berkembang menjadi bentuk kompleks yang sulit ditelusuri dan menimbulkan akibat yang merugikan

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu sebagai berikut : 1) Apakah penegakan peraturan, sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas aparat berpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening? 2) Apakah kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh langsung atau tidak langsung penegakan peraturan, sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. 2) Untuk mengevaluasi pengaruh langsung atau tidak langsung kecenderungan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Telaah Pustaka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Kecurangan akuntansi (*Fraud*) menurut *Black Low Dictionary* dalam Tunggal (2010) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

### **Penegakan Peraturan**

Penegakan peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat (Asshidiqie, 2008).

### **Sistem Kompensasi**

Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada

organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Kenneth, 2001 dalam Friskila, 2010).

#### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Menurut Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP PP RI Nomor 24/2005.

#### **Moralitas Aparat**

Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Bertens (1993) dalam Aranta (2013), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”, kita berbicara “moralitas suatu perbuatan” artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk.

#### **Perilaku Tidak Etis**

Buckley *et al.*, (1998) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok yang telah disepakati.

#### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

LAN (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

#### **Pengembangan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Kegiatan operasional setiap organisasi harus bebas dari tindakan kecurangan dalam bentuk apapun. Maka, semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut agar terhindar dari segala macam kecurangan.

**H1a : Penegakan peraturan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.**

##### **2. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Perilaku Tidak Etis**

Semua kegiatan dan perilaku para aparat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam suatu instansi, apabila penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang atau perilaku tidak etis.

**H1b : Penegakan peraturan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya perilaku tidak etis.**

##### **3. Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Keinginan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yaitu melakukan kecurangan. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh

ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaannya. Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindak kecurangan.

**H2a : Sistem kompensasi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.**

#### **4. Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Perilaku Tidak Etis**

Sistem kompensasi yang didesain dengan baik diharapkan mampu mendorong karyawan berprestasi secara optimal. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan karyawan berperilaku tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Tindakan menyimpang diharapkan dapat berkurang dengan adanya sistem kompensasi yang didesain dan dikontrol dengan baik.

**H2b : Sistem kompensasi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya perilaku tidak etis.**

#### **5. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Meningkatkan ketaatan pada aturan akuntansi pada sebuah instansi dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang nantinya akan membantu instansi untuk menyediakan informasi laporan keuangan secara objektif kepada pihak yang berkepentingan.

**H3a : Ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.**

#### **6. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Perilaku Tidak Etis**

Meningkatkan kesadaran individu terhadap ketaatan aturan akuntansi pada sebuah instansi diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan salah satunya perilaku tidak etis. Semakin individu taat pada aturan akuntansi yang berlaku, semakin rendah perilaku tidak etis para aparat di instansi pemerintahan.

**H3b : Ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya perilaku tidak etis.**

#### **7. Pengaruh Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Salah satu penyebab kecurangan ialah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Maka dengan meningkatkan moralitas setiap aparat instansi pemerintah diharapkan dapat menekan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

**H4a : Moralitas aparat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.**

#### **8. Pengaruh Moralitas Aparat Terhadap Perilaku Tidak Etis**

Fauwzi (2011) menjelaskan bahwa kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Dalam suatu instansi yang diwakili aparatnya, moralitas merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap tindakan yang diambil suatu instansi. Moralitas aparat yang buruk dapat meningkatkan terjadinya perilaku tidak etis.

**H4b : Moralitas aparat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya perilaku tidak etis.**

### **9. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Penelitian Dallas (2002) terhadap Enron, menunjukkan bukti bahwa perilaku yang terfokus pada uang sebagai tujuan akhir akan mengabaikan faktor nilai dan akan berakibat menghalalkan segala cara. Jika perilaku yang ditunjukkan manajemen cenderung tidak etis maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

**H5 : Perilaku tidak etis mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.**

### **10. Pengaruh Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek kecurangan akuntansi yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Semakin tingginya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi di lingkungan instansi pemerintah berdampak terhadap semakin menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H6 : Kecenderungan kecurangan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

### **11. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dimediasi Oleh Perilaku Tidak Etis**

Kurang efektifnya penegakan peraturan dalam instansi akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran

peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku tidak etis. Apabila penegakan peraturan tidak dapat berjalan secara efektif maka dapat meningkatkan perilaku tidak etis di antara pegawai yang akhirnya akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin meningkat.

**H7 : Penegakan peraturan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimediasi oleh perilaku tidak etis.**

### **12. Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dimediasi Oleh Perilaku Tidak Etis**

Apabila sistem kompensasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka dapat menimbulkan perilaku tidak etis yang ingin memaksimalkan keuntungan pribadi. Perilaku tidak etis tersebut dapat meningkatkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di instansi.

**H8 : Sistem kompensasi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimediasi oleh perilaku tidak etis.**

### **13. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dimediasi Oleh Perilaku Tidak Etis**

Penerapan ketaatan terhadap aturan akuntansi yang tidak berjalan secara efektif dapat menimbulkan perilaku tidak etis diantara para pegawai yang akhirnya menyebabkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat merugikan instansi.

**H9 : Ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh**

**terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimediasi oleh perilaku tidak etis.**

#### **14. Pengaruh Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dimediasi Oleh Perilaku Tidak Etis**

Moralitas aparat yang rendah dapat dengan mudah menimbulkan perilaku tidak etis yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan pribadinya tanpa memikirkan akibatnya terhadap organisasi. Perilaku tidak etis tersebut akhirnya dapat meningkatkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat merugikan organisasi.

**H10 : Moralitas aparat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimediasi oleh perilaku tidak etis.**

### **METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan adalah dinas dan badan yang terdapat di Kota Pekanbaru yang berjumlah 17 dinas dan 10 badan. Pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan secara *purposive* memilih pegawai yang bekerja pada sub bagian keuangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah skala likert.

Metode analisis data yang dilakukan dengan teknik statistika antara lain pengujian kualitas data

yang dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Serta teori analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Variabel kecenderungan kecurangan akuntansi diukur dengan 9 pertanyaan yang dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut ACFE dalam Najahnigrum (2013) yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi, dengan skala Likert 1 – 5.

Variabel penegekan peraturan diukur menggunakan instrumen yang terdiri dari lima pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Zulkarnain (2013). Respons dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5.

Variabel sistem kompensasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan dari komponen-komponen pertimbangan kompensasi Rivai (2010) dalam Tiro (2014) yang kemudian dimodifikasi, terdiri dari 6 pertanyaan. Jawaban responden diukur dengan skala Likert 1 – 5.

Variabel ketaatan aturan akuntansi diukur dengan enam item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dari IAI (1998) dalam Wilopo (2006) mengenai kode etik akuntan dengan skala Likert 1 - 5.

Variabel moralitas aparat diukur menggunakan model pengukuran moral yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam Wilopo (2006). Variabel ini diukur melalui 6 butir instrumen yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus dilema etika akuntansi.

Variabel perilaku tidak etis diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Robinson (1995) dan Tang *et al.*, (2003) dalam Wilopo (2006) dan diukur dengan tiga item pertanyaan dengan skala Likert 1 – 5.

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur menggunakan instrumen yang

dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya dalam Haspiarti (2012) yang berhubungan dengan variabel ini. Skala Likert 1-5 digunakan untuk mengukur respons dari responden.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel yang digunakan adalah dinas dan badan yang terdapat di Kota Pekanbaru yang berjumlah 17 dinas dan 10 badan.

### Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebarakan sebanyak 81 eksemplar dari jumlah tersebut yang diterima kembali 75 eksemplar, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 6 eksemplar. Sehingga jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 75 eksemplar.

### 1. Pengujian Kualitas Data Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS dengan *Outer Model* yaitu *Convergent Validity* yang dilihat dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,50 maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70 (Ghozali, 2011). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* diatas 0,70, sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

### Analisis *Partial Least Square* (PLS) 2. Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50.

Berdasarkan pada *outer loading* Pra Eliminasi, terdapat 17 indikator yang harus dikeluarkan dari model karena *outer loading* indikator tersebut kurang dari 0,50 dan tidak signifikan.

*Discriminant Validity* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai *loading* dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai *loading* yang paling besar dengan nilai *loading* lain terhadap variabel laten lainnya.

### 3. Pengujian Model Struktural

Model struktural dalam PLS digunakan untuk melihat R-squared untuk setiap variabel laten dependen. Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan 2 variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) yang dipengaruhi oleh penegakan peraturan (PP), sistem kompensasi (SK), ketaatan aturan akuntansi (KAA), moralitas aparat (MA), sedangkan variabel perilaku tidak etis (PTE) yang



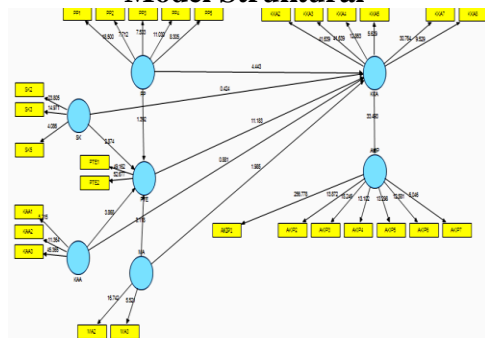
dipengaruhi oleh penegakan peraturan (PP), sistem kompensasi (SK), ketaatan aturan akuntansi (KAA), moralitas aparat (MA) dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dipengaruhi oleh kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA).

### Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Parameter signifikansi yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian.

Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung diuji dengan menggunakan rumus Sobel yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

**Gambar 1**  
**Model Struktural**



Sumber : Output SmartPLS, 2015

Model yang mampu memberikan informasi dapat dijelaskan pada gambar 1, bagaimana pengaruh variabel penegakan peraturan, sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis serta pengaruhnya

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

penelitian ini menggunakan t tabel. Dalam pengujian hipotesis untuk regresi, derajat bebas (df) ditentukan dengan rumus :  $n - k - 1$ . Dimana  $n$  : banyaknya data dan  $k$  : banyaknya variabel bebas. Pengujian ini menggunakan uji satu arah dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  (0,05), dengan nilai df sebesar 70. Sehingga penelitian ini menggunakan t tabel 1,667.

### Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

#### 1. Hasil pengujian penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Hasil pengujian hipotesis 1a dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel penegakan peraturan (PP) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,159 dengan nilai t sebesar 4,237. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Dalam suatu instansi, peraturan dibuat agar kegiatan operasional suatu instansi dapat berjalan efektif dan efisien. Peraturan ini juga dibuat dalam rangka mengendalikan perilaku para pegawai agar terhindar dari perbuatan kecurangan akuntansi. Pejabat yang berwenang harus bertindak secara tegas memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 1a diterima**.

#### 2. Hasil pengujian penegakan peraturan terhadap perilaku tidak etis

Hasil pengujian hipotesis 1b dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan

variabel penegakan peraturan (PP) dengan perilaku tidak etis (PTE) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,064 dengan nilai t sebesar 1,553. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,667.

Tidak berpengaruhnya penegakan peraturan pada perilaku tidak etis disebabkan oleh instansi terkait masih mengabaikan peraturan yang berlaku sehingga pegawai masih leluasa untuk melakukan tindakan perilaku tidak etis. Serta pemberian sanksi yang masih kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para perilaku tidak etis tersebut. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 1b ditolak.**

### **3. Hasil pengujian sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**

Hasil pengujian hipotesis 2a dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel sistem kompensasi (SK) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,026 dengan nilai t sebesar 0,381. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,667.

Tidak berpengaruhnya sistem kompensasi pada kecenderungan kecurangan akuntansi disebabkan oleh tidak adanya sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam mengelola organisasi, serta ganjaran dan pinalti yang dapat menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 2a ditolak.**

### **4. Hasil pengujian sistem kompensasi terhadap perilaku tidak etis**

Hasil pengujian hipotesis 2b dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel sistem kompensasi (SK)

dengan perilaku tidak etis (PTE) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,379 dengan nilai t sebesar 4,093. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Pemberian kompensasi secara adil dapat mengurangi rasa iri yang dapat memunculkan perilaku tidak etis, dengan kata lain sistem pembagian kompensasi harus sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur yang dimana hal tersebut dapat mencegah atau meminimalkan perilaku tidak etis. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 2b diterima.**

### **5. Hasil pengujian ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**

Hasil pengujian hipotesis 3a dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel ketaatan aturan akuntansi (KAA) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,054 dengan nilai t sebesar 0,692. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,667.

Tidak berpengaruhnya ketaatan aturan akuntansi pada kecenderungan kecurangan akuntansi disebabkan oleh faktor tekanan yang dialami pegawai dalam suatu instansi. Tekanan untuk mencapai target yang telah ditentukan manajemen dapat membuat seseorang melakukan segala hal seperti manipulasi, pemalsuan dokumen dan segala kecurangan akuntansi untuk mencapai target tersebut. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 3a ditolak.**

### **6. Hasil pengujian ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis**

Hasil pengujian hipotesis 3b dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan

ketaatan aturan akuntansi (KAA) dengan perilaku tidak etis (PTE) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,368 dengan nilai t sebesar 4,916. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin taat pegawai terhadap aturan akuntansi, maka perilaku tidak etis di suatu instansi semakin berkurang. Cara profesi diorganisir, yaitu melalui antara lain kode etik dan ketaatan aturan akuntansi akan memberikan pengaruh serta mengendalikan perilaku manajemen. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 3b diterima**.

#### **7. Hasil pengujian moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**

Hasil pengujian hipotesis 4a dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan moralitas aparat (MA) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,111 dengan nilai t sebesar 1,860. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Individu yang berada pada tahapan moralitas tinggi (tahapan *post-conventional*) cenderung akan memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan dirinya sendiri dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral. Sehingga pada tahap *post-conventional* individu cenderung menghindari melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 4a diterima**.

#### **8. Hasil pengujian moralitas aparat terhadap perilaku tidak etis**

Hasil pengujian hipotesis 4b dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan moralitas aparat (MA) dengan perilaku tidak etis (PTE) menunjukkan nilai koefisien jalur

sebesar -0,317 dengan nilai t sebesar 4,061. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas aparat, maka perilaku tidak etis akan semakin menurun. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral dapat meningkatkan perilaku menyimpang yang pada akhirnya dapat merusak bahkan mengancam organisasi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 4b diterima**.

#### **9. Hasil pengujian perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**

Hasil pengujian hipotesis 5 dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel perilaku tidak etis (PTE) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,721 dengan nilai t sebesar 7,905. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Perilaku tidak etis dalam suatu organisasi disebabkan sikap dan tanggung jawab moral manajemen dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi atau instansi yang diwakili manajemennya, moralitas manajemen merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh setiap pegawai dalam suatu instansi. Sehingga standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 5 diterima**.

#### **10. Hasil pengujian kecenderungan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis 6 dapat dilihat pada gambar 1 yang

menunjukkan bahwa hubungan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,879 dengan nilai t sebesar 29,021. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk prestasi organisasi yang dicapai melalui realisasi tanggung jawab pengelola atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Realisasi tanggung jawab tersebut salah satunya dapat dilihat dari minimnya kecurangan akuntansi yang terjadi dalam suatu instansi. Sehingga semakin berkurangnya kecurangan akuntansi yang terjadi akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 6 diterima.**

#### **11. Hasil pengujian penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis**

Hasil pengolahan data mediasi pada gambar 1 menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak etis (PTE) terhadap penegakan peraturan (PP) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) tidak berpengaruh yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,046 dan nilai t sebesar 1,512. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,667.

Individu yang melakukan perbuatan melanggar peraturan harus dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Namun, kenyataannya pemberian sanksi yang sudah tegas dan peraturan yang sudah ditegakkan dengan baik oleh pejabat berwenang tidak menimbulkan efek jera kepada para pelakunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan peraturan yang baik belum dapat menekan terjadinya perilaku tidak

etis yang akan berdampak terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam suatu instansi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 7 ditolak.**

#### **12. Hasil pengujian sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis**

Hasil pengolahan data mediasi pada gambar 1 menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak etis (PTE) terhadap sistem kompensasi (SK) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) berpengaruh yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,274 dan nilai t sebesar -3,612. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Bagi pegawai kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas. Dengan adanya rasa tidak puas yang dimiliki pegawai akibat kompensasi yang diberikan tidak sesuai dapat memicu terjadinya perilaku tidak etis yang pada akhirnya akan menyebabkan pegawai tersebut cenderung melakukan kecurangan akuntansi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 8 diterima.**

#### **13. Hasil pengujian ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis**

Hasil pengolahan data mediasi pada gambar 1 menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak etis (PTE) terhadap ketaatan aturan akuntansi (KAA) dengan kecenderungan

kecurangan akuntansi (KKA) berpengaruh yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,266 dan nilai t sebesar -4,151. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Semakin taat pegawai terhadap segala aturan akuntansi mengakibatkan semakin menjauhkannya dari perilaku tidak etis. Karena perilaku tidak etis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila ketaatan suatu instansi terhadap aturan akuntansi semakin tinggi, maka semakin rendah perilaku tidak etis yang dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 9 diterima.**

#### **14. Hasil pengujian moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis**

Hasil pengolahan data mediasi pada gambar 1 menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak etis (PTE) terhadap moralitas aparat (MA) dengan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) berpengaruh yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,229 dengan nilai t sebesar -3,589. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,667.

Individu yang berada pada tahapan moralitas tinggi (tahapan *post-conventional*) cenderung lebih memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Segala tindakan yang dilakukannya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang baik. Sehingga individu pada tahap *post-conventional* ini cenderung menghindari segala tindakan perilaku menyimpang. Hal ini berarti bahwa **Hipotesis 10 diterima.**

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penegakan peraturan dan moralitas aparat memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun variabel sistem kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh mediasi sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas aparat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Namun mediasi perilaku tidak etis antara penegakan peraturan dan kecenderungan kecurangan akuntansi tidak mempunyai hubungan.

### **Keterbatasan penelitian**

Terdapat responden yang menjawab pertanyaan dengan tidak sungguh, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan.

Perlu melakukan wawancara kepada responden dengan cara menanyakan apakah responden seorang kepala bagian atau staf dengan cara *screening*.

### **Saran**

Penggunaan selain metode survey seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek.

Ketika membagi kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti

memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aranta, P.Z. 2013. *Pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pemerintah kota sawahlunto)*. (online), ([ejournal.untp.ac.id](http://ejournal.untp.ac.id), diakses 22 Okt 2014).
- Asshidiqie, Jimly. 2008. *Penegakan Hukum*.<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakanhukum.pdf>. 30 Mei 2015
- Association of Certified Fraud Examiners. [www.acfe.com](http://www.acfe.com) diakses 5 Desember 2014.
- Fauwzi, M.G. 2011. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Friskila, Rini Sumiati. 2010. *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Badan Usaha Milik Negara di Padang*. Skripsi S1. FE UNP.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling, metode alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi ketiga. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*.
- Indonesian Corruption Watch. [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org). (diakses pada Oktober 2014).
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Unnes.
- Puspasari, Novita & Suwardi, Eko. 2012. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintah Daerah*. Jurnal. Yogyakarta : Feb Ugm.
- Thoyibatun, S. 2009. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 16, 2: 245-260.
- Tiro, A.A.A. 2014. *Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Transparency International. [www.transparency.org](http://www.transparency.org), diakses pada Oktober 2014.

- Tunggal, A.W. 2011. *Teori dan Kasus Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.9.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan*. Jurnal. Semarang : Fakultas Ekonomi Unnes.